



Gita dan Istrinya Dituntut 1,5 Tahun

• Tiga Terdakwa Biogas Dituntut Seragam

DENPASAR, TRIBUN BALI - Tiga terdakwa kasus dugaan korupsi proyek energi terbarukan, biogas di Nusa Penida, Klungkung tahun 2014 menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Tipikor Denpasar, Jumat (24/4). Ketiga terdakwa dituntut seragam yakni 1,5 tahun.

Ketiga terdakwa menjalani sidang secara terpisah, yakni anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Klungkung, Gede Gita Gunawan (42) dan istrinya, Thiarta Ningsih (36). Juga Kabid Pengembangan Kawasan Pedesaan Klungkung, juga KPA sekaligus PPK, I Made Catur Adnyana (56).

Dalam surat tuntutan, tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Klungkung kompak menuntut ketiganya dengan pidana setahun enam bulan (1,5 tahun) penjara. Ketiganya dinilai bersalah melakukan korupsi secara bersama-sama. Terhadap tuntutan tim jaksa, para terdakwa melalui masing-masing tim penasihat hukum akan mengajukan pembelaan (pledoi) tertulis.

"Saya serahkan ke tim penasihat hukum untuk pembelaan," ucap terdakwa Thiarta

Ningsih yang lebih dulu menjalani sidang. Dua terdakwa lainnya juga mengajukan pembelaan tertulis. Dengan diajukan pembelaan dari para terdakwa, sidang akan kembali digelar pekan depan.

"Menuntut, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Thiarta Ningsih dengan pidana penjara selama satu tahun dan enam bulan (1,5 tahun), dikurangi selama menjalani tahanan sementara, dengan perintah tetap berada dalam tahanan. Menghukum denda Rp 50 juta, subsidair tiga bulan kurungan," tegas Jaksa Kadek Wira Atmaja.

Pula wanita yang beberapa bulan lalu melahirkan ini, diwajibkan membayar uang pengganti Rp 792.912.654. "Apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang. Dalam hal ini jika tidak mempunyai harta benda yang mencukupi, maka diganti pidana penjara selama sembilan bulan," imbuh jaksa.

Pasal serupa juga dikenakan kepada terdakwa Gede Gita Gunawan dan I Made Catur

Adnyana. Keduanya pun sama-sama dituntut penjara setahun enam bulan, denda Rp 50 juta, subsidair tiga bulan kurungan. Yang berbeda, kedua terdakwa tidak dibebankan membayar uang pengganti kerugian negara.

Diketahui, perkara ini mencuat dari temuan tahunan BPK. Temuan menyatakan jika ada proyek tidak termanfaatkan di Kecamatan Nusa Penida. Setelah didalami, proyek ini merupakan pemasangan proyek energi terbarukan biogas Rp 896.870.700. Proyek tersebut leading sektornya di Badan Pemerdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, dan KB saat itu.

Pemasangan proyek energi terbarukan biogas dikerjakan tahun 2014, dengan sasaran tiga desa yakni Desa Kutampi Kaler, Kelumpu, dan Desa Sakti. Pemasangan biogas itu ditarget 40 unit, tersebar di tiga desa tersebut. Namun yang terpasang 38 unit dan parahnya proyek ini setelah dicek ternyata sama sekali tidak termanfaatkan. Padahal per satu unit bernilai Rp 22 juta. Atas perbuatan yang diduga dilakukan ketiga terdakwa, negara mengalami kerugian mencapai Rp 792.912.654. (can)



Kelanjutan Pembangunan RS Nyitdah

Pemkab Harapkan Bantuan Pusat

Tabanan (Bali Post) -

Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti berkesempatan bertemu Presiden Jokowi di Istana Negara, belum lama ini. Saat itu Bupati Eka menemani Gubernur Bali Wayan Koster. Dalam pertemuan tersebut, Jokowi membeberkan bantuan pembangunan yang akan didapatkan Bali. "Pada kesempatan itu tidak lupa saya sampaikan, untuk Tabanan tolong jangan lupa dengan rumah sakit kami pak. Jawaban Pak Jokowi saat itu akan dikoordinasikan dengan Kementerian Kesehatan," ujar Bupati Eka, Selasa (23/4) kemarin.

Dijelaskannya, pembangunan RS Nyitdah mengalami sedikit hambatan karena permasalahan dana. Adanya

'lampu hijau' dari Presiden Jokowi tentu tidak disia-siakannya. Ia mengaku akan secepatnya mempersiapkan proposal permohonan dana pembangunan RS Nyitdah ke Kementerian Kesehatan. "Proposal akan segera disiapkan dalam waktu dekat," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Tabanan dr. Nyoman Suratmika mengungkapkan pihaknya telah membuat proposal pengajuan dana ke pusat untuk pembangunan RS Nyitdah.

Ia memaparkan, saat ini Tabanan sudah memiliki RS tipe B dalam hal ini BRSU Tabanan yang sudah berjalan optimal meski mengalami kendala lahan yang terbatas. "BRSU Tabanan

memiliki kendala lahan yang sempit. Karena itu dibangunlah RS Nyitdah sebagai RS tipe C yang akan menunjang pelayanan BRSU ke depan," papar Suratmika.

Namun, pembangunan RS Nyitdah saat ini terhambat karena permasalahan dana. Dulu Pemkab Tabanan sempat mengajukan pinjaman namun kemudian batal karena berbagai pertimbangan, salah satunya ketidakmampuan membayar cicilan. Untuk bisa menuntaskan pembangunan RS Nyitdah, menurut Suratmika tahun ini pihaknya telah membuat proposal untuk dana BKK senilai Rp 71 miliar. "Mudah-mudahan dibantu secara bertahap. Kita akan cicil membangun

RS Nyitdah sesuai dengan DED," ujarnya.

Mengenai pengajuan proposal ke Kementerian Kesehatan, lanjut Suratmika, biasanya jika mengajukan dana ke Kemenkes ada dana DAK. "Pasti dibantu. Cuma karena Tabanan saat ini punya dua rumah sakit, tidak bisa sekaligus banyak. Untuk tahun ini pun kita mengajukan dana DAK ke Kemenkes untuk pemenuhan alat kesehatan," jelas Suratmika.

Pembangunan RS Nyitdah baru mencakup dua blok gedung. Jika sesuai DED, seharusnya ada lima blok yang terhubung menjadi satu. Diharapkan dengan adanya bantuan pusat, pembangunan RS Nyitdah bisa terselesaikan. (kmb24)

Edisi : Rabu, 24, April, 2019

Hal : 7



Tak Tuntaskan Proyek Jembatan Dua Kontraktor Di-''blacklist''

Bangli (Bali Post) -

Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (PUTRPerkim) Kabupaten Bangli akan segera mem-**blacklist** dua kontraktor yang gagal menuntaskan proyek pembangunan jembatan Metra-Kedui dan jembatan Belancan-Bukih. Dua kontraktor yang diberi sanksi tegas tersebut yakni PT Tunas Teknik Sejati dan PT Mukti Global Kostrindo. "Kita akan **blacklist**. Sekarang masih kita tunggu suratnya, nanti kita ajukan ke dia," kata Kasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Dinas PUTRPerkim Kabupaten Bangli Ida Bagus Suandi seizin Kadis I Wayan Lawe, Selasa (23/4) kemarin.

Ida Bagus Suandi mengatakan, pascagagal menuntaskan pengerjaan proyek pembangunan jembatan di masa perpanjangan 90 hari yang diberikan, pihaknya telah melakukan pemutusan kontrak dengan dua rekanan tersebut. Dia menyebutkan untuk proyek jembatan Metra-Kedui, hingga berakhirnya masa perpan-

jangsan 26 Maret lalu, pihak rekanan hanya mampu mengerjakan hingga 56,45 persen. Sementara proyek jembatan Belancan-Bukih persentase pengerjaan yang diselesaikan rekanan baru 85,783 persen.

Suandi mengungkapkan ada beberapa hal yang menjadi kendala pihak rekanan tak mampu menuntaskan

dua proyek tersebut. Di antaranya karena medan yang sulit, cuaca hingga persoalan kekurangan material di lapangan.

Pascaputus kontrak, Suandi belum bisa memastikan kapan proyek jembatan yang kini mangkrak itu akan bisa dilanjutkan kembali. Terkait kelanjutan pembangunan dua jembatan

itu, pihaknya mengaku akan mengusulkannya ke Bupati dan Sekda. "Kita akan lapor ke pimpinan dulu. Seperti apa arahan beliau nanti, apakah bisa dilanjutkan di perubahan mendahului atau bagaimana," terangnya.

Sementara itu, terpisah Kasi Intel Kejaksaaan Negeri Bangli Marhaniyanto mengatakan, pascagagal menuntaskan pekerjaannya di masa perpanjangan waktu selama 90 hari, pihak rekanan pelaksanaan dua proyek jembatan itu tidak bisa lagi diberikan kesempatan mengerjakan proyek itu untuk yang kedua kalinya. Meskipun mereka bersedia untuk melanjutkan kembali dan bersedia membayar den-

da. Dia menjelaskan sesuai Permenkeu, pihak rekanan hanya boleh diberikan perpanjangan sekali selama 90 hari setelah masa kontraknya berakhir. "Kita dari TP4D sudah pernah bahas itu. Apakah bisa diberikan perpanjangan waktu lagi. Ternyata dari sisi ketentuan, memang tidak ada dan tidak bisa untuk diberikan perpanjangan kembali. Dalam aturan Permenkeu, kalau tidak bisa selesai 90 hari ya harus putus kontrak," jelasnya.

Marhan mengatakan bahwa pihaknya di TP4D (Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah) selama ini memang memberikan pendampingan

terhadap kedua proyek jembatan yang gagal tuntas itu. Namun sebatas pendampingan hukum, berupa pendapat-pendapat hukum agar pelaksanaan proyek itu sesuai ketentuan dan PPK (pejabat pembuat komitmen) tidak ragu untuk mengambil langkah dalam pelaksanaan kegiatan proyek.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya proyek pembangunan jembatan penghubung antara Banjar Metra, Desa Yangapi dan Banjar Kedui, Desa Tembuku di Kecamatan Tembuku yang pengerjaannya sempat molor, kini mangkrak. Hal itu cukup memprihatinkan mengingat proyek Pemkab

Bangli tahun 2018 lalu itu menyedot anggaran yang cukup besar dengan nilai mencapai Rp 5 miliar lebih.

Selain Metra-Kedui, ada tiga jembatan lainnya yang juga dibangun Pemkab Bangli di tahun 2018, yakni jembatan Batur-Gunung Kunyit dengan anggaran Rp 6,1 miliar, jembatan Gunung Bau-Binyan dengan anggaran Rp 6,5 miliar dan jembatan Belancan-Bukih dengan anggaran Rp 5,1 miliar lebih. Tak hanya jembatan Metra-Kedui yang pembangunannya gagal tuntas 100 persen di tahun 2018, ketiga jembatan lainnya juga nasibnya tak jauh beda. (kmb40)



PPK Blacklist Dua Rekanan Proyek

■ Buntut Tak Selesainya Dua Jembatan

BANGLI, TRIBUN BALI

- Dua dari empat proyek pembangunan jembatan di Bangli belum selesai hingga berakhirnya masa tenggang selama 90 hari. Dua rekanan yang mengerjakan proyek tersebut akhirnya diblacklist. Selain itu mereka juga berkewajiban membayar denda.

Ketua Tim Pengawasan, Pengamanan Pemerintahan, dan Pembangunan Daerah (TP4D), Mahraniyanto mengatakan, dua proyek pembangunan jembatan yang tidak selesai yakni Belancan-Bukih dan proyek jembatan di Metra-Kedui.

Terkait pembangunan jembatan di Metra-Kedui, Marhan telah mengetahui alasan pihak rekanan tidak bisa menyelesaikan kegiatan pembangunan jembatan penghubung dua desa itu. Ini lantaran terkendala curah hujan yang tinggi serta medan yang sangat sulit.

Karena pengerjaan telah melewati waktu perpanjang-

an, mau tidak mau sesuai ketentuan harus diputus kontrak. "Kalau memang tidak selesai selama 90 hari, ya putus kontrak. Untuk melakukan putus kontrak (blacklist) bukan di tangan TP4D, tapi itu langsung di PPK (Pejabat Pembuat Komitmen)," ungkapnya, Selasa (23/4).

Adanya pendampingan dari TP4D namun juga ada dua proyek tidak selesai karena sifat pendampingan yang dilakukan terbatas hanya dari sisi hukum. Pada prinsipnya pendampingan yang dilakukan TP4D agar tidak ada keragu-raguan dari PPK dalam melaksanakan kegiatan pembangunan.

"Jadi kami tidak masuk dalam area pelaksanaan langsung. Tugas TP4D hanya berusaha meminimalisir pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan. Misal kebijakan terkait perpanjangan dan sebagainya. Andaikan ada

kendala dalam hal pelaksanaan, itu murni dari pihak kontraktor dan pendampingan TP4D tidak bisa berbuat apapun," ucapnya.

Pria yang juga Kasi Intel Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangli ini menanggapi perpanjangan yang diberikan pada kontraktor selama 90 hari setelah melewati tahun anggaran berjalan. Kata dia, hal tersebut diatur dalam undang-undang yakni PMK No. 243 Tahun 2015. Di samping itu, pihaknya juga pernah mengeluarkan legal opinion (LO) untuk kegiatan serupa yakni revitalisasi drainase di Kota Bangli.

"Diatur dalam Permenkeu dan karena sudah ada LO sebelumnya maka jika ada kegiatan lain yang lewat tahun anggaran, sudah tidak perlu LO lagi. Sedangkan perpanjangan kali kedua, Kami dari TP4D sudah pernah membahas itu, tapi ternyata dari sisi ketentuan tidak ada untuk memperpanjang kembali meski mereka bersedia untuk melanjutkan dan membayar denda," ujarnya.

Sementara itu, PPK Proyek Pembangunan Jembatan Metra-Kedui, Ida Bagus Suandi tidak memungkiri rekanan pelaksana kegiatan itu diputus kontrak lantaran tidak bisa menyelesaikan kegiatan pembangunan hingga perpanjangan waktu selama 90 hari. Terdapat kendala mulai dari medan, kondisi cuaca, serta kekurangan material yang menyebabkan PT. Tunas Teknik Sejati selaku rekanan tidak bisa menyelesaikan kegiatan. (mer)



PAD 2019 Dirancang Jadi Rp 179,5 Miliar

Semarapura (Bali Post) -

Pemkab Klungkung merancang PAD dalam APBD Induk 2019, menjadi Rp 179,5 miliar. Jumlah ini turun dari pagu indikatif perubahan 2018, karena saat itu dirancang cukup tinggi. Pemkab optimis mampu mencapai itu dalam setahun ke depan, melihat seluruh potensi daerah yang sudah diperhitungkan matang. Khususnya, di sektor pariwisata.

Sekda Klungkung Gede Putu Winastra, Jumat (19/4) kemarin, mengatakan PAD sebesar itu, dirancang dari sejumlah target pos pendapatan, seperti pos pendapatan pajak daerah Rp 56,4 miliar, hasil retribusi daerah Rp 28,8 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp 8,1 miliar dan lain-lain PAD yang sah Rp 86,2 miliar.

Sekda menegaskan, secara keseluruhan, pendapatan dirancang mencapai Rp 1,16 triliun. Selain dari PAD, ada juga sumber pendapatan dari dana perimbangan Rp 701,8 miliar, terdiri dari bagi hasil pajak Rp 19,2 miliar, dana alokasi umum Rp 554,2 miliar, dan dana alokasi khusus Rp 128,3 miliar.

Sedangkan, untuk pos anggaran lain-lain pendapatan

daerah yang sah, dirancang Rp 228,01 miliar. Terdiri dari pendapatan hibah Rp 27,6 miliar, dana bagi hasil pajak dari provinsi dan kabupaten lainnya Rp 90,9 miliar, dana penyesuaian dan otonomi khusus Rp 98,5 miliar dan bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya Rp 70,8 miliar.

Dibandingkan tahun lalu, realisasi pendapatan daerah saat disampaikan dalam rapat paripurna dewan oleh Bupati Suwirta, mencapai Rp 1,1 triliun, dari pagu indikatif perubahan RKPD Tahun 2018 sebesar Rp 1,126 triliun lebih, atau mencapai 97,7 persen. Realisasi pendapatan ini bersumber dari PAD Rp 186,9 miliar. Lebih rendah Rp 5,1 miliar dari pagu indikatif perubahan RKPD tahun 2018 sebesar Rp 192,1 miliar atau mencapai Rp 97,3 miliar.

Realisasi pendapatan yang bersumber dari dana perimbangan Rp 669,7 miliar, lebih rendah Rp 10,9 miliar dari pagu indikatif perubahan RKPD 2018 sebesar Rp 680,6 miliar. Sumber dana perimbangan yang tidak memenuhi target adalah pada penerimaan dana bagi hasil pajak dan bukan pajak yang teralisasi Rp

18,4 miliar dari pagu indikatif perubahan RKPD tahun 2018 sebesar Rp 21,7 miliar atau hanya mencapai 84,4 persen. Selain itu, juga penerimaan dana alokasi khusus yang terealisasi Rp 120,9 miliar lebih dari pagu indikatif perubahan 2018 sebesar Rp 128,4 miliar.

Sedangkan, realisasi pendapatan yang bersumber dari pendapatan lain-lain yang sah tahun anggaran 2018, sebesar Rp 243,4 miliar. Ini capaiannya juga tak mencapai target, karena tercapai 93,3 persen dari pagu indikatif perubahan 2018 sebesar Rp 253,2 miliar. "Tahun 2018, khususnya pada pagu indikatif perubahan itu memang sengaja dipasang target tinggi-tinggi. Kami sudah bekerja maksimal, agar semuanya tercapai dan sesungguhnya tinggal sedikit lagi," kata Sekda Winastra.

Dia berharap target PAD pada khususnya maupun pendapatan secara umum, dapat terlampaui dengan segala potensi dan strategi yang sudah disiapkan dengan sangat matang oleh Bupati Klungkung Nyoman Suwirta. Dengan target PAD tahun ini sebesar Rp 179,5 miliar, dia optimis target itu dapat terealisasi. (kmb31)



Radar Bali

Dana Segar, Rp 6,6 M untuk Kelurahan

Dibagi 19 Kelurahan,
Masing-masing Rp 325 Juta

SINGARAJA – Sebanyak 19 kelurahan yang ada di Kabupaten Buleleng, akan menerima suntikan dana segar sebesar Rp 6,6 miliar. Dana tersebut akan digunakan membiayai kegiatan yang ada di tingkat kelurahan. Dana itu pun telah ditransfer pemerintah pusat ke rekening pemerintah daerah.

Pelaksana Tugas Kepala Badan kelurahan, serta kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan. Dengan tambahan dana itu, kegiatan di kelurahan pun diharapkan bisa berjalan dengan lebih optimal.

Lebih lanjut Suyasa menjelaskan, sebelum digunakan, kelurahan harus melakukan musyawarah untuk menentukan kegiatan. Musyawarah itu melibatkan berbagai pihak, baik itu tokoh masyarakat maupun unsur perwakilan masyarakat di tingkat kelurahan, seperti Lembaga Pem-

Keuangan Daerah (BKD) Buleleng Gede Suyasa mengatakan, dana Rp 6,6 miliar itu akan dibagi rata ke 19 kelurahan di Buleleng. Sehingga masing-masing kelurahan akan menerima dana sebesar Rp 325 juta. Dana itu pun kini telah tercantum dalam pos Dana Alokasi Umum (DAU) Pemkab Buleleng.

Menurut Suyasa dana tambahan itu merupakan amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 130 Tahun 2018. Alokasi anggaran itu akan disesuaikan dengan kondisi dan kategori daerah masing-masing.

berdayaan Masyarakat (LPM).

Berita acara hasil musyawarah selanjutnya diajukan kepada camat dan nantinya dilanjutkan ke Bappeda Litbang. Selanjutnya dana akan dicantumkan dalam Daftar Penggunaan Anggaran (DPA) di masing-masing kecamatan. "Seluruh kegiatan di kelurahan, nanti akan dilaksanakan lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Tapi dananya tersimpan di kecamatan," tandas Suyasa. (eps/gup)

kasi anggaran itu akan disesuaikan dengan kondisi dan kategori daerah masing-masing.

"Alokasi dananya sudah diatur secara jelas oleh Kementerian Dalam Negeri. Karena Buleleng masuk dalam daerah kategori baik. Maka alokasi DAU untuk kelurahan sebesar Rp 325 juta per kelurahan," katanya.

Nantinya dana itu akan digunakan untuk membiayai kegiatan yang ada di Kelurahan. Terutama untuk pembangunan sarana dan prasarana



Alokasi dananya sudah diatur secara jelas oleh Kementerian Dalam Negeri. Karena Buleleng masuk dalam daerah kategori baik. Maka alokasi DAU untuk kelurahan sebesar Rp 325 juta per kelurahan."

GEDE SUYASA

Plt. Kepala BKD Buleleng

Edisi : Sabtu, 20 April 2019

Hal : 10



Jalan Jebol Dibiarkan?

GIANYAR-Banyaknya jalan kabupaten yang kondisinya rusak mendapat sorotan warga. Seperti ditemukan di sepanjang jalan pusat kota Gianyar tepatnya 500 meter ke arah selatan dari Lapangan Astina.

Di sudut Jalan Kapten Dipta menuju Jalan Suli dihiasi lubang menganga. Bahkan, kondisi jalan rusak tersebut sudah sebulan. Warga pun berinisiatif memasang peringatan dari pohon.

Kelian Banjar Sangging Anak Agung Gede Mayun menyatakan, lubang menganga tersebut akibat dilindas truk sarat muatan. "Kejadiannya sekitar sebulan lebih," ujarnya kemarin (19/4).

Mayung mengatakan pihaknya langsung bersurat kepada instansi terkait dari tingkat terbawah sampai Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Gianyar. "Sudah sempat saya surati sekitar dua minggu lalu ke Dinas PUPR, perantara dari Pak Lurah. Soalnya ini *kan* jalan perbatasan antara jalan kabupaten dan jalan desa. Makanya biar ada kepastian dulu dan sampai saat ini belum ada tanda-tanda tindaklanjuti. Mau bagaimana lagi, harus sabar saja," ucapnya.

Dia mengimbau pengguna kendaraan bermotor hati-hati melintas di kawasan tersebut. Sebab, minim penerangan. Warga juga memasang pohon di lubang tersebut.

Sementara itu, salah satu warga yang ditemui menyatakan jalan jebol akibat truk pengangkut pasir melintas di lokasi. "Sopi truk langsung pergi tanpa mau tanggungjawab," kata Sudi, warga setempat sembari menambahkan beberapa petugas sempat ke lokasi mengambil foto, tapi belum ada perbaikan. (dra/dot)



Berkas Korupsi LPD Kapal Telah Dilimpahkan

DENPASAR, TRIBUN BALI

- Pihak kejaksaan telah melimpahkan berkas lima tersangka kasus dugaan korupsi LPD Desa Adat Kapal, Badung ke Pengadilan Tipikor Denpasar. Kelima tersangka akan segera didudukkan di kursi pesakitan menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Denpasar. Terkait pelimpahan berkas itu, dibenarkan oleh Jaksa I Wayan Suardi.

"Ya, sudah dilakukan pelimpahan ke Pengadilan Tipi-

kor Denpasar," ujarnya saat dikonfirmasi, Jumat (19/4).

Para tersangka di antaranya Ni Luh Rai Kristianti (50) asal Lingkungan Banjar Celuk, Kapal, Badung, Ni Kadek Ratna Ningsih (37) asal Banjar Tegal, Kelurahan Kapal, Badung, Ni Wayan Suwardani (36) asal Banjar Panglan, Kelurahan Kapal, Badung saat ini sebagai pegawai kontrak di RSUD Badung.

Dua tersangka lainnya adalah Ni Made Ayu Ardianti (42)

Banjar Titih, Kelurahan Kapal, Badung dan Ni Nyoman Sudiasih (36) Banjar Lagon, Kelurahan Kapal Badung. Semuanya merupakan mantan kolektor LPD Desa Adat Kapal.

Suardi mengatakan jadwal sidang telah ditentukan pihak Pengadilan Tipikor. "Sesuai jadwal, sidangnya digelar pekan depan. Jika tidak salah, pemberitahuan sidang tanggal 23 April," jelas jaksa dari Kejati Bali ini.

Diberitakan sebelumnya,

dalam perkara ini majelis hakim Pengadilan Tipikor Denpasar telah menjatuhkan vonis tiga tahun dan enam bulan (3,6 tahun) terhadap mantan Ketua LPD Desa Adat Kapal, Made Ladra (53). Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kajari Badung, Cakra Yudha Hadi Wibowo menyatakan, kelima tersangka itu bekerja sama dengan Made Landra.

"Bahkan dari penuturan tersangka, ada yang mengaku uangnya digunakan un-

tuk membuat usaha warung babi guling," jelasnya, kala pelimpahan tahap II di Kejaksaan Negeri (Kejari) Badung.

Sebagaimana diberitakan dalam berkas perkara, tersangka Ni Luh Rai Kristianti mempertanggungjawabkan uang sebesar Rp 15.352.058.925. Besaran nominal ini dari perbuatan tersangka yang sudah dilakukan berkali-kali sejak bekerja sebagai kolektor sampai dengan tahun 2012. (can)



Dibangun dengan Biaya Puluhan Miliar Rupiah ACJN Rambut Siwi Dibiarkan Terbengkalai

Negara, (Bali Post) -

Sejak selesai dibangun setahun lalu, Anjungan Cerdas Jalan Nasional (ACJN) Rambut Siwi belum dimanfaatkan dengan maksimal. Bahkan ACJN kini terkesan terbengkalai. Proyek pembangunan ACJN ini merupakan proyek dari pemerintah pusat dengan anggaran Rp 67 miliar yang dilakukan *multiyears* oleh PT Nindya Karya Wilayah VII sejak Oktober 2016 lalu. Pengerjaan anjungan cerdas ini rampung lebih cepat dari batas waktu yang ditentukan.

Dari pengamatan Senin (22/4) kemarin, dari pintu masuk sebelah selatan tampak tampak berhamburan. Kemudian rumput tampak tinggi. Kolam yang di atasnya ada patung juga tampak kotor dan berlumut. Masuk ke dalam gedung sejumlah fasilitas sudah terlihat rusak. Dari bawah terlihat plafon di lantai dua juga sudah jebol.

Amphitheater di bagian timur juga terlihat kotor. Ruangan di belakang panggung tampak penuh dengan kotoran kutu busuk yang berwarna hitam sehingga baunya menyengat. Di sela-sela tempat duduk yang dibuat setengah lingkaran di lokasi amphitheater juga kini ditumbuhi rerumputan cukup panjang.

Meskipun sudah kelar dibangun dan jalan di depan ACJN sudah diperlebar, namun akses masuk ke lokasi tersebut masih tertutup. Areal tersebut belum bisa dimasuki kendaraan maupun orang. Justru belakangan, pelebaran jalan di depan ACJN dimanfaatkan untuk parkir truk-truk.

Truk-truk kerap berderet untuk parkir. Beberapa di antaranya tidak ada sopir atau kernet, artinya truk

memang sengaja ditinggal parkir di sana. Sehingga terkesan di lokasi tersebut hanya untuk tempat parkir truk. Padahal dari rencana fungsinya lebih luas.

Adanya bangunan yang tidak pernah dioperasikan ini juga sering mengundang pertanyaan warga yang melintas. Sejatinnya difungsikan untuk apa bangunan-bangunan tersebut. Sebab sudah hampir setahun lebih bangunan tersebut tak pernah digunakan ataupun akses masuk dibuka. Bahkan belakangan lokasi tersebut dijadikan ajang tuk pacaran oleh anak-anak muda yang bisa masuk dengan jalan kaki.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PU-PRPKP) Jembrana, I Wayan Darwin, dikonfirmasi mengatakan, ACJN belum sepenuhnya diserahkan oleh pihak pusat ke Pemkab Jembrana.

Terkait pelebaran jalan juga memang dilakukan selain untuk tempat parkir juga penanganan banjir yang sering terjadi di jalan tersebut. Rekonstruksi jalan yang dilakukan karena jalan nasional di depan ACJN itu dinilai sempit.

Sehingga kini akses lebih luas dan kendaraan bisa lebih leluasa.

Sementara itu dari informasi izin pemanfaatan Anjungan Cerdas Jalan Nasional (ACJN) Rambut Siwi dari Kementerian PUPR sudah keluar pada bulan Januari lalu.

Karena itu, Bupati Jembrana I Putu Artha mengimbau agar OPD terkait mulai melakukan pemanfaatan gedung tersebut sambil menunggu proses serah terima.

Artha juga menyampaikan pesan dari Kementerian PUPR bahwa ACJN harus segera dimanfaatkan tanpa memungut sewa. "Kement-

erian berharap agar pemanfaatan sesegera mungkin dilaksanakan, agar gedung ini tidak terkesan kosong begitu saja," ungkap Artha.

Artha meminta kepada OPD terkait seperti Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, dan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga agar mulai menyiapkan inovasinya untuk pemanfaatan gedung ini.

"Untuk dinas terkait agar sesegera mungkin menyiapkan programnya dalam mengelola aset ini. Untuk Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga bila perlu ajak anak-anak sekolah

datang ke sini (ACJN,red), melakukan kegiatan bermain atau melakukan kegiatan sekolah seperti pembagian raport," tuturnya.

Anjungan Cerdas Jalan Nasional Rambut Siwi merupakan proyek Kementerian PUPR, bertujuan sebagai tempat beristirahat bagi pengendara yang melewati jalan nasional sekaligus tempat berwisata yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas. Proyek yang menelan APBN Rp 67 miliar ini memiliki sejumlah fungsi yang dimiliki Anjungan Cerdas Jalan Nasional, antara lain informasi, edukasi, ekonomi dan hiburan. (kmb)



Proyek Pembangu nan Jembatan Kedui-Metra Mangkrak

Bangli (Bali Post) -

Proyek pembangunan jembatan penghubung antara Banjar Metra, Desa Yangapi dengan Banjar Kedui, Desa Tembuku, Kecamatan Tembuku yang pengerjaannya sempat molor, kini akhirnya mangkrak. Hal itu cukup memprihatinkan, mengingat proyek Pemkab Bangli tahun 2018 itu menyedot anggaran yang cukup besar mencapai Rp 5 miliar lebih.

Berdasarkan pantauan Senin (22/4) kemarin, di lokasi proyek tampak sepi. Hanya terlihat sejumlah material yang menumpuk seperti pasir, korral dan tumpukan semen yang sudah membatu. Beberapa peralatan proyek seperti dua unit molen pencampur adonan semen juga masih nangkring di dekat lokasi tumpukan material. Terlihat jalanan menurun menuju jembatan yang masih berupa tanah cukup membahayakan karena mulai tergerus longsor dampak hujan.

Sementara itu, kondisi jembatan yang dibangun, tampak baru sebatas pembuatan struktur/pondasi kepala jembatan di kedua sisi serta pemasangan besi yang akan menjadi lantai jembatan, melintang di antara kedua kepala jembatan. Jika dibandingkan dengan realisasi pembangunan saat akhir tahun lalu, tak banyak progres dari pengerjaan proyek itu. Padahal pascamasa kontrak berakhir Desember tahun lalu, Pemkab Bangli melalui Dinas PUTRPerkim telah memberikan kesempatan kepada pihak pemborong untuk melanjutkan pengerjaan proyek jembatan itu hingga tuntas selama kurang lebih 90 hari. Namun kenyataannya, proyek yang kabarnya berada di bawah pengawasan TP4D Kejari Bangli tersebut tak juga bisa tuntas sampai sekarang.

Camat Tembuku Dewa Agung Purnama saat dikonfirmasi siang ke-

marin tak menampik bahwa proyek pembangunan jembatan Metra-Kedui itu kini mangkrak. Dia menjelaskan proyek jembatan yang dibangun tahun 2018 itu hingga masa kontraknya berakhir, belum tuntas. Pemkab Bangli pun memberikan pihak pemborong melanjutkan kembali pengerjaannya. "Sesuai undang-undang dibolehkan. Diberikan kesempatan hingga 26 Maret," terangnya.

Akan tetapi hingga mendekati 26 Maret proyek itu belum juga tuntas. Dewa Purnama mengaku tidak mengetahui secara pasti apa penyebab tak tuntasnya proyek itu. Kemudian sekitar dua hari jelang tanggal 26 Maret, Pemkab Bangli dipimpin Sekda melaksanakan rapat dengan masyarakat. Dalam rapat itu, masyarakat mengusulkan kepada Pemkab Bangli agar proyek jembatan tersebut tetap dilanjutkan hingga tuntas. Sebab keberadaan jembatan itu sangat diidam-idamkan masyarakat sejak lama. Saat itu, pihak Dinas PUTRPerkim memberi jawaban akan memfasilitasi usulan masyarakat untuk disampaikan ke Bupati. "Jawaban PU saat itu akan memfasilitasi dan mengawal. Akan disampaikan kepada pimpinan, selanjutnya pimpinan akan berkoordinasi dengan TP4D. Jadi seperti itu," pungkasnya.

Adanya pertemuan Pemkab Bangli dengan masyarakat terkait belum selese-nya pembangunan jembatan itu juga

diakui Perbekel Tembuku Ketut Mudiarsa. Dia mengungkapkan pertemuan itu digelar untuk mengatasi keresahan masyarakat terkait tak tuntasnya pembangunan jembatan itu. "Karena sempat ada polemik di masyarakat terkait pembangunan jembatan yang belum tuntas itu. Wajar saja, karena masyarakat kan inginnya pembangunannya bisa cepat selesai," terangnya.

Mudiarsa mengatakan penyebab tak tuntasnya pembangunan jembatan itu dikarenakan lokasi pembangunan jembatan yang lumayan curam dan kondisi cuaca yang tidak mendukung. Dari informasi yang didapatnya, rencananya pembangunan jembatan akan dilanjutkan kembali pada Juni mendatang.

Sementara itu, berdasarkan informasi yang dihimpun di Dinas PUTRPerkim Bangli belum lama ini, pada tahun 2018 Pemkab Bangli membangun empat buah jembatan. Selain Metra-Kedui, tiga jembatan lainnya yang juga dibangun yakni jembatan Batur-Gunung Kunit dengan anggaran Rp 6,1 miliar, jembatan Gunung Bau-Binyan dengan anggaran Rp 6,5 miliar dan jembatan Belancan-Bukih dengan anggaran Rp 5,1 miliar lebih. Tak hanya jembatan Metra-Kedui yang pembangunannya gagal tuntas 100 persen di tahun 2018, ketiga jembatan lainnya juga nasibnya tak jauh beda. (kmb40)

Edisi : Selasa, 23, April, 2019

Hal : 14



Proyek RTH Taman Bung Karno Jadi Catatan LKPJ APBD 2018

Singaraja (Bali Post) -

Setelah disibukkan tahapan pemilihan umum (pemilu), DPRD Buleleng sekarang disibukkan agenda pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) APBD Buleleng 2018. Rapat gabungan komisi-komisi itu dipimpin Wakil Ketua DPRD Ketut Wirsana.

Dalam pembahasan awal, Senin (22/4) kemarin, dewan mulai menyepakati beberapa poin yang dijadikan catatan dalam rekomendasi LKPJ APBD 2018. Dari beberapa poin rekomendasi itu, dewan memasukkan persoalan yang terjadi dalam pelaksanaan proyek pembangunan Taman Bung Karno di Lingkungan Sangket, Kecamatan Sukasada menjadi poin rekomendasi. Meskipun proyek itu mandek, dewan mendesak agar pemerintah daerah melanjutkan proyek itu pada tahun anggaran 2019.

Ketua Komisi II DPRD Buleleng Putu Mangku Budiasa mengatakan, proyek RTH Taman Bung Karno itu sudah ditunggu masyarakat sebagai ikon Buleleng. Proyek RTH itu memiliki relasi dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Sayangnya, pada tahun 2018 lalu, proyek RTH itu tidak bisa digarap tuntas. Bahkan, Dinas Perumahan Permukiman

Pertanahan (Perkimta) Buleleng telah memutuskan kontrak pelaksanaan proyek tersebut. "Kita ketahui bersama kalau RTH Taman Bung Karno itu mandek. Kontrak pekerjaannya diputus tahun 2018 lalu. Khususnya kami di Komisi II memasukkan perjalanan proyek itu dalam catatan rekomendasi terhadap LKPJ APBD Buleleng 2018," katanya.

Selain dijadikan catatan penting, politisi PDI-P asal Desa Selat, Kecamatan Sukasada ini mendesak pemerintah daerah tahun ini untuk menuntaskan proyek yang sudah ditunggu-tunggu publik di Buleleng itu. Alasannya, karena RTH Taman

Bung Karno itu sudah masuk perencanaan pembangunan yang disepakati bersama dewan. Kalau proyeknya tidak digarap tuntas, Budiasa khawatir pelaksanaan proyek itu justru menjadi preseden buruk citra pemerintah oleh masyarakat Buleleng. "Kami tidak mengerti soal teknis proyek dan menyangkut patung Bung Karno itu berkaitan bidang seni. Namun apa pun itu, karena sudah masuk perencanaan pembangunan, maka kami menyepakati tahun ini, proyek itu kami harap dituntaskan, sehingga tidak memunculkan preseden

buruk di masyarakat kita," jelasnya.

Selain proyek RTH Taman Bung Karno, mantan Perbekel Desa Selat, Kecamatan Sukasada itu menyoroti realisasi dana hibah bantuan sosial (bansos) dalam bentuk bantuan bedah rumah yang bersumber dari Dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kabupaten Badung. Dia menyarankan pada proses penyerahan BKK berikutnya, diusulkan agar ada analisis yang kuat terhadap warga yang menjadi sasaran BKK itu. Ini penting karena dari realisasi bedah rumah itu muncul kesan di masyarakat kalau penerimanya adalah warga yang dari kemampuan ekonomi sudah mapan. Namun justru, mereka itu dimasukkan sebagai penerima bedah rumah.

"Ada kesan masyarakat yang justru lebih layak menerima malah mereka tidak dapat. Saya kira ke depan, perlu dicermati sebelum realisasi ada verifikasi dan penerima agar benar-benar mereka yang layak menerima bantuan bedah rumah itu," jelasnya.

Rencananya, DPRD Buleleng menggelar sidang paripurna Selasa (23/4) ini untuk membacakan poin rekomendasi dewan terhadap LKPJ APBD Buleleng Tahun 2019. (kmb38)



Bali Post/kmb38

BAHAS LKPJ - DPRD Buleleng membahas LKPJ APBD Buleleng Tahun 2018 di gedung dewan Senin (22/4) kemarin.



LKPJ Bupati Hanya Dibahas 13 Anggota Dewan

★ Soroti Pembangunan Tidak Kelar



ANGGOTA yang hadir dalam rapat pembahasan LKPJ Bupati atas APBD tahun 2018, Senin (22/4) di ruang Rapat Gabungan Komisi DPRD Buleleng.

SINGARAJA, NusaBali

Lembaga DPRD Buleleng kembali membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati atas APBD tahun 2018, di tengah suasana perhitungan perolehan suara Pileg 2019. Tak ayal, pembahasan yang berlangsung, Senin (22/4) pagi hanya dihadiri oleh 13 orang anggota dari 45 anggota DPRD Buleleng.

Pembahasan LKPJ Bupati, Senin kemarin berlangsung di tingkat Gabungan Komisi. Rapat tersebut hanya dihadiri oleh 13 orang, termasuk pimpinan rapat Wakil Ketua DPRD Buleleng, Ketut Wir-sana. Menariknya, dari 13 anggota yang hadir, 3 anggota di antaranya adalah caleg incumbent yang dikabarkan terpental di Pileg 2019. Mereka masing-masing Putu Tirta Adnyana (Caleg Golkar tingkat DPRD Provinsi Bali), Gusti Ketut Nuaba

(Caleg Golkar tingkat DPRD Provinsi Bali) dan Mangku Made Ariawan (caleg Demokrat tingkat DPRD Kabupaten Buleleng).

"Walaupun kami sudah berusaha meraih suara, tetapi hasilnya berbeda, itulah pilihan masyarakat. Tetapi yang namanya tugas dan tanggungjawab sebagai wakil rakyat dengan masa bakti yang masih tersisa ini, ya harus tetap dilaksanakan untuk menyuarakan aspirasi masyarakat," kata Made Ariawan.

Politisi Demokrat asal Desa Panji, Keamatan Sawan ini menegaskan, dirinya komit melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya hingga masa baktinya selesai Agustus 2019 mendatang. "Saya berharap pilihan masyarakat bisa memperjuangkan aspirasinya. Saya tetap akan melaksanakan tugas sampai masa bakti selesai," ujarnya.

Sementara dalam pembasan itu banyak hal yang disoroti. Salah satunya adalah proyek-proyek yang sempat tidak selesai tepat waktu di tahun 2018. Dewan pun medesak agar proyek-proyek madeg itu dituntaskan lagi. Ketua Komisi II DPRD Buleleng Putu Mangku Budiasa mengatakan, proyek RTH Taman Bung Karno sudah ditunggu oleh masyarakat sebagai icon Buleleng memiliki hubungan dalam perjalanan sejarah Bangsa Indonesia. "Kita ketahui bersama kalau RTH taman Bung Karno itu mandeg dan kontrak pekerjaanya diputus tahun 2018 lalu. Khususnya kami di Komisi II memasukan perjalanan proyek itu dalam catatan rekomendasi terhadap LKPJ APBD Buleleng 2018," katanya.

Selain proyek RTH Taman Bung Karno, mantan politisi PDIP asal Desa Selat, Kecamatan Sukasada ini juga menyoroti realiasi dana hibah bantuan sosial (bansos) yang dicarikan dalam bentuk bedah rumah dengan sumber dari Dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dari Kabupaten Badung. Dia menyarankan untuk penyerahan berikutnya, dewan mengusulkan agar ada analisis yang kuat terhadap warga yang menjadi sasaran BKK. Ini penting karena dari realisasi bedah rumah, muncul kesan di masyarakat kalau penerimanya adalah warga yang secara kemampuan ekonomi sudah mapan, namun dimasukan dalam penerima bedah rumah.

"Ada kesan masyarakat lebih layak menerima jurtru tidak mendapat. Saya kira ke depan ini perlu pencermatan dan sebelum realisasi ada verifikasi dan penerima agar benar-benar layak menerima bantuan bedah rumah itu," jelasnya.

Sementara itu, rencananya DPRD Buleleng menggelar sidang paripurna Selasa (23/4) hari ini untuk membacakan poin rekomendasi dewan terhadap LKPJ APBD Buleleng Tahun 2019.



OPD Takut Manfaatkan ACJN Rambut Siwi

NEGARA, NusaBali

Izin pemanfaatan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terhadap Anjungan Cerdas Jalan Nasional (ACJN) Rambut Siwi di Banjar Tegak Gede, Desa Yehembang Kangin, Kecamatan Mendoyo, Jembrana, belum ditindaklanjuti Pemkab Jembrana. Beberapa kepala organisasi perangkat daerah (OPD) yang sempat diharapkan memanfaatkan, mengakui

takut memanfaatkan ACJN tersebut, dengan pertimbangan belum ada serah terima aset secara resmi dari Kementerian PUPR.

Hal tersebut diakui salah satu kepala OPD Pemkab Jembrana, Minggu (22/4). Kepala OPD yang sempat mendapat instruksi memanfaatkan ACJN itu, mengaku sebenarnya OPD Pemkab Jembrana sudah memiliki rancangan untuk meramaikan situasi di ACN

itu. Namun belum ada serah terima aset dari Kementerian PUPR, membuat dia bersama rekan-rekannya belum berani memanfaatkan proyek yang cukup lama terbengkalai itu. "Kami siap mengisi konten di sana. Seperti ada gedung amphitheater, dan ada rencana gedung tempat pameran. Tetapi masalahnya, ini berkaitan dengan aset, dan secara resmi belum ada serah terima," ujar salah satu kepala OPD yang enggan namanya dikorbankan.

Saat arisan pejabat pada Februari lalu, Bupati Jembrana I Putu Artha, juga sempat menginstruksikan kepada beberapa OPD terkait, agar bisa memanfaatkan sejumlah fasilitas di ACJN yang mangkrak hampir selama 2 tahun lebih itu. Di antaranya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Dikpora), Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan (Koperindag), dan beberapa OPD lainnya. "Ya kami terbentur legalitas. Lain kalau sudah ada serah terima.

Sebenarnya banyak yang mau menggunakan. Tetapi jika ada kerusakan-kerusakan sebelum resmi diserahkan, siapa yang tanggung jawab? Terkecuali memang sudah diserahkan ke daerah," ungkapnya.

Sementara Kadis Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PU-PRPKP) Jembrana I Wayan Darwin, mengatakan ACJN yang dibangun Kementerian PUPR itu memang belum diserahkan ke Pemkab Jembrana. Dari koordinasi ke pihak Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Kamis (24/1/2019) lalu, dari pihak BPIW memang telah mempersilakan Pemkab Jembrana memanfaatkan fasilitas di ACJN tersebut, sembari menunggu proses serah terima yang belum dipastikan waktunya oleh pihak Kementerian PUPR. "Kami menunggu. Dari koordinasi terakhir, masih diproses untuk serah terima ACJN itu," ujarnya. **ode**

Edisi : Selasa, 23 April 2019

Hal : 7



Pusat Akan Bantu Perbaiki Beji Toya Sah Rp 2 M_l

AMLAPURA, NusaBali

Kementerian Agama men-
ganggarkan pembangunan Pura
Beji Toyasah di Banjar Susut,
Desa Muncan, Kecamatan Se-
lat, Karangasem, sebesar Rp 2
miliar. Rencananya pembangu-
nan dilakukan pada tahun 2020.
Anggaran itu disetujui pusat atas
usulan dari Kantor Kementerian
Agama Karangasem.

Kepala Kantor Kementerian
Agama Karangasem, Dr Dra
Ni Nengah Rustini MAg, men-
gatakan mengajukan proposal
pembangunan kembali Pura
Beji Toyasah setelah areal pura
dan beji Toyasah ambles diter-
jang banjir September 2017.
Mata air yang ada tertimbun,
pancuran hanyut, begitu juga
palinggi lenyap.

Kerusakan Beji Toyasah itu
dua tahap. Tahap pertama,
telaga yang di dalamnya berisi
mata air jebol, sehingga air
mengalir melalui jalur bawah.
Upaya perbaikan darurat per-
nah dilakukan masyarakat den-
gan menyumbat kebocoran,
berlanjut menggelar upacara
guru piduka. Kerusakan beri-

kutnya diterjang banjir besar
sehingga seluruhnya lenyap.
Beji Toyasah itu merupakan
tempat melasti Ida Bhatara di
Pura Besakih saat menggelar
Karya Agung Ida Bhatara Tu-
run Kabeh, tiap dua tahun.

Sebab, Ida Bhatara Turun
Kabeh melasti secara bergan-
tian tiap tahun, sekali di Tegal
Suci, Desa Adat Tegenan, Desa
Menanga, Kecamatan Rendang,
dan sekali di Beji Toya Sah,
Banjar Susut, Desa Muncan,

Kecamatan Selat. Setelah biaya
Rp 2 miliar disetujui, teknis
pembangunan nanti agar anti
banjir, sehingga Beji Toyasah
kembali direvitalisasi lengkap
dengan bale pesandekan, bale
pawedan, dan tempat muspa
yang representatif. "Misalnya
agar bangunan aman dari ban-
jir, dibentengi dengan bangu-
nan batu bronjong," pintanya.

Di samping itu agar banjir ti-
dak merongrong bangunan Beji
Toyasah, terlebih dahulu dibuat-

kan sodetan jalan air dengan
menormalisasi Sungai Yehsah,
kemudian dibangun pondasi
berupa batu bronjong. Dr Rus-
tini mengatakan, Beji Toyasah
bukan saja tempat melasti Ida
Bhatara Turun Kabeh di Pura
Besakih, juga untuk melasti
umat saat menggelar Karya
Mamungkah lan Nubung Dag-
ing, Usaba Kapat di Pura Puseh,
Usaba Kadasa di Pura Puseh, dan
upacara terkait lainnya, yang
ditandai nunas tirtha. Air dari
Mata Air Beji Toyasah selama ini
untuk kebutuhan irigasi.

Perbekel Desa Muncan, I
Gusti Lanang Ngurah, menga-
presiasi perjuangan Kantor Ke-
menterian Agama Karangasem
memperjuangkan agar bisa
kembali dibangun Pura Beji
Toyasah di Banjar Susut. Se-
bab, lokasi itu yang disucikan
umat Hindu, manakala melas-
ti dan disertai nunas tirtha.
"Kami mendukung perjuangan
Kepala Kantor Kementerian
Agama, sehingga Pura Beji
Toyasah bisa dibangun kembali
yang lebih permanen dan anti
banjir," katanya. **k16**



FASILITAS



ANOM SUARDANA / RADAR BALI

BELUKAR: Anjungan Cerdas Jalan Nasional Rambut Siwi berantakan.

AJCN Rambut Siwi Nganggur

NEGARA – Meski Kementerian PUPR sudah memberikan lampu hijau untuk pemanfaatan Anjungan Cerdas Jalan Nasional (ACJN) Rambut Siwi, Mendoyo. Namun hingga kini proyek bernilai puluhan miliar rupiah itu masih nganggur.

Apa sebab? Ternyata ACJN Rambut Siwi itu belum sepenuhnya diserahkan ke pemerintah daerah. “Kami belum menerima sepenuhnya dari pemerintah pusat,” kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum, dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPRP-KP) Jembrana I Wayan Darwin kemarin (22/4). Proyek multi years yang menelan dana Rp 67 miliar itu baru selesai tahun lalu.

Namun, belum juga dimanfaatkan warga. Fasilitas di ACJN Rambut Siwi sudah banyak yang rusak. Plafon di lantai dua jebol, air kolam yang kotor dan berlumut, sampah berserakan, di tambah belukar di sekeliling gedung. Tak hanya itu, akses warga untuk masuk juga tidak bisa karena pintu masuk tertutup rapat. (nom/gup)

Edisi : Selasa, 23 April, 2019

Hal : 5



Radar Bali



EKA PRASETYA/RADAR BALI

PRESTISIUS: Proyek RTH Bung Karno kini tersendat.

Dewan Minta Kepastian Pemkab

SINGARAJA - DPRD Buleleng meminta kepastian pada pemerintah, terkait rencana lanjutan pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Bung Karno, yang kini tengah tersendat. Dewan juga meminta kepastian soal pembuatan patung, yang juga mandeg gara-gara kontraktor yang lalai melaksanakan tugasnya.

Ketua Komisi II DPRD Buleleng Putu Mangku Budiasa mengatakan, proyek RTH Bung Karno merupakan salah satu proyek pemerintah yang menjadi perhatian dewan. Pasalnya proyek itu termasuk proyek prestisius yang berpengaruh terhadap perwajahan Kota Singaraja. "Setahu kami, Dinas Perkimta selaku leading sector, sudah terus melakukan konsultasi ke LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) dan BPK terkait masalah ini. Kami tidak tahu masalah teknisnya seperti apa, tapi kami minta patungnya tahun ini harus selesai. Karena ini yang sangat dinanti-nanti masyarakat," tegasnya.

Asal tahu saja, pengerjaan RTH Bung Karno tahap III kini mandeg. Patung yang semestinya telah berdiri dan menjadi ikon baru kota, ternyata tak selesai dikerjakan. Alih-alih terpasang pada pedestal yang disiapkan, ternyata baru bagian kaki dan kepala saja yang tuntas. (eps/gup)

Edisi : Selasa, 23, April, 2019

Hal : 9



Cuaca dan Medan Proyek Terkendala

BANGLI, TRIBUN BALI -

Pembangunan jembatan penghubung dua desa yang berlokasi di Dusun Metra menuju Dusun Kedui hingga kini belum menunjukkan kemajuan. Meski bagian fondasi telah berdiri, jembatan yang terletak di Desa Tembuku dan Desa Yangapi ini justru belum disertai badan penghubung.

Terlihat sebuah baja melintang antara dua kepala jembatan. Bagian ini memang sempat dipasang oleh beberapa orang pekerja utamanya untuk pengelasan. Sejumlah alat dan bahan bangunan berupa koral, pasir, serta molen (alat pengaduk semen) masih terlihat berada di lokasi Senin (22/4). Meski demikian, tak satu pun pekerja yang melanjutkan pembangunan jembatan dengan anggaran senilai Rp 4,6 miliar itu.

kat pihaknya juga sempat mengumpulkan sejumlah perangkat Desa Yangapi, Desa Tembuku, hingga tokoh masyarakat untuk meminimalisir munculnya polemik maupun persepsi negatif. "Sekitar sebulan lalu dikumpulkan di kantor Desa Tembuku," ucapnya.

Berdasarkan informasi



TRIBUN BALI/RATU AYU ASTRI DESIANI

MANGKRAK - Kondisi pembangunan jembatan penghubung Dusun Kedui, Desa Tembuku menuju Dusun Metra, Desa Yangapi, Senin (22/4).

Perbekel Desa Tembuku, Ketut Mudiarsa mengatakan, penyebab proyek tak berjalan karena cuaca serta lokasi pembangunan yang tergolong sulit. Ini yang membuat pengerjaan jembatan yang sedianya kelar pada 2018 ini terpaksa mundur. Ia meyakini pembangunan jembatan

yang dihimpun di Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PUPRKim) Bangli, setidaknya terdapat tiga lokasi lain pembangunan jembatan pada tahun 2018 lalu, selain di Metra-Kedui.

Di antaranya pembangunan jembatan Batur-Gunung Kuniyit dengan anggaran

penghubung dua desa tersebut akan dilanjutkan setelah anggarannya disetujui.

"Awal pengerjaannya sekitar bulan Juni 2018, kondisi cuaca saat itu memasuki musim penghujan. Terlebih, lokasi pembangunan jembatan itu cukup curam, ada tebing disana yang berbaha-

Rp 6,1 miliar, pembangunan jembatan Gunung Bau-Binyan dengan anggaran Rp 6,5 miliar, serta pembangunan jembatan Belancan-Bukih dengan anggaran Rp 5,1 miliar. Empat kegiatan pembangunan jembatan ini seluruhnya gagal tuntas 100 persen hingga akhir tahun 2018. (mer)

ya dan kondisi tanah tergolong labil. Karena berlomba dengan cuaca dan situasi di lokasi sekitar tidak memungkinkan, maka tidak bisa dikejar target pembangunannya. Tahun ini dilanjutkan," ungkapnya.

Terhentinya pembangunan jembatan penghubung dua desa ini sempat menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat yang menanyakan mengapa pembangunan jembatan tak kunjung usai.

Mudiarsa mengaku maklum jika masyarakat berharap pembangunan jembatan segera terselesaikan. "Wajar jika masyarakat inginnya cepat. Sebab mereka belum mengetahui bagaimana situasi dan kondisi akan potensi bahaya di lokasi pembangunan," ujarnya.

Mudiarsa mengatakan, terkait keresahan masyarakat



Dewan Desak Penyelesaian Taman Bung Karno

SINGARAJA, TRIBUN BALI

Ketua Komisi II DPRD Buleleng, Putu Mangku Budiasa mendesak Pemkab Buleleng agar segera menuntaskan proyek pembangunan RTH Taman Bung Karno di Kecamatan Suksada, Buleleng pada tahun ini. Hal tersebut ia ungkapkan dalam rapat pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) APBD 2018 di ruang rapat gabungan, Senin (22/4).

Ditemui se usai rapat, Budiasa mengatakan, proyek RTH Taman Bung Karno sudah ditunggu oleh masyarakat sebagai ikon Buleleng. Namun dalam di tahun 2018 lalu, proyek tersebut tidak bisa digarap tuntas lantaran pihak rekanan dalam hal ini PT Chandra Dwipa tak mampu menyelesaikan pengerjaan patung Bung Karno secara tepat waktu dengan alasan terkendala finansial.

Dinas Perumahan Pemukiman Pertanahan (Perkimta) Buleleng pun memutuskan kontrak pelaksanaan proyek tersebut. "Kami ketahui bersama kalau RTH Taman Bung Karno itu mandeg dan kontrak pekerjaannya diputus



TRIBUN BALI/RATU AYU ASTRI DESIANI

tahun 2018 lalu. Khususnya kami di Komisi II memasukkan perjalanan proyek itu dalam catatan rekomendasi terhadap LKPJ APBD Buleleng 2018," katanya.

Politikus PDIP asal Desa Selat, Kecamatan Suksada ini juga menyebutkan, RTH Taman Bung Karno sudah masuk dalam perencanaan pembangunan yang disepakati bersama dewan. Jika proyeknya tidak digarap

Kami ketahui bersama kalau RTH Taman Bung Karno itu mandeg dan kontrak pekerjaannya diputus tahun 2018 lalu

Putu Mangku Budiasa

Ketua Komisi II DPRD Buleleng

tuntas, Budiasa khawatir hal tersebut dapat menimbulkan citra buruk bagi pemerintah daerah.

"Kami tidak mengerti soal teknis proyek dan menyangkut patung Bung Karno itu berkaitan bidang seni, namun apa pun itu, karena sudah masuk dalam perencanaan pembangunan dan kami menyepakati, maka tahun ini kami minta proyeknya dituntaskan, sehingga tidak

memunculkan citra buruk di masyarakat kita," tutupnya.

Sebelumnya, Bupati Buleleng Putu Agus Suradnya mengaku akan meminta kepada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemkab Buleleng untuk lebih memperkuat proses tender. Sebab berdasarkan pengalaman, kata Suradnya, rekanan yang sudah diblacklist memiliki banyak cara agar dapat kembali mengikuti proses tender.

"Besok di-blacklist, besok dia mohon lagi izin baru dengan menggunakan nama anaknya. Saya minta nanti dilihat keseluruhannya, harus diupdate mengubah paradigma baru bagi ULP untuk penyelamatan pekerjaan-pekerjaan kami," ujar dia.

Mengingat pihak rekanan PT Chandra Dwipa telah resmi berhenti mengerjakan pembangunan RTH Bung Karno, maka Pemkab Buleleng akan kembali melakukan proses tender pada anggaran perubahan. "Ini diaudit BPK dulu berapa pastinya dibayarkan. Diputus nanti, baru kami tender di anggaran perubahan," tutupnya. (rtu)



Jalan Tak Kunjung Diperbaiki, Diduga Korban Politik

BANGLI, NusaBali

Ruas jalan di Banjar Apuan Kaja, Desa Apuan menuju Desa Abuan, Kecamatan Susut, Bangli, sejak lama rusak. Hingga kini, jalan sepanjang 2 kilometer ini belum diperbaiki. Jalan rusak ini disebut sebagai korban politik karena partai penguasa kalah di Desa Apuan. Warga berharap jalan penghubung dua desa ini segera diperbaiki.

Menurut warga sekitar, petugas sudah sering turun melakukan pengukuran kerusakan. Pengukuran kerusakan jalan dimulai sejak tahun 2016. Warga pun meyakini jalan Desa Apuan-Desa Abuan ini segera diperbaiki karena sudah disurvei dan diukur petugas. "Hanya diukur saja, entah kapan diperbaiki," keluh warga setempat, Minggu (21/4). Dikatakan, kerusakan paling parah mulai dari depan Pura Dadia Manikan, Banjar Apuan Kaja hingga perbatasan Desa Abuan. Jalan ini ramai dilalui masyarakat yang hendak ke Desa Abuan. "Memang ada jalan lain, tapi jaraknya lebih jauh," imbuhnya.

Ia menduga, perbaikan jalan tidak bisa dipisahkan dengan kepentingan politik. Apalagi partai penguasa kalah di Desa Apuan. "Mungkin ada muatan politik sehingga jalan dibiarkan rusak seperti ini," tukasnya. Terpisah, Perbekel Desa Apuan, I Made Cerita, membenarkan jika jalan

penghubung Banjar Apuan Kaja dengan Desa Abuan rusak sejak lama. Jalan tersebut merupakan jalan terdekat menghubungkan Banjar Banguan Lemah, Apuan Kelod, dan Apuan Kaja menuju Desa Abuan. "Rusak sejak lima

tahun lalu. Status jalan kabupaten," ungkapnya.

Made Cerita mengaku sudah mengusulkan perbaikan melalui Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam). Ia meyakinkan per-

baikan jalan akan dilaksanakan tahun ini. "Sudah masuk dalam cek list ruas jalan yang akan diperbaiki lewat program hotmik," jelasnya. Sementara Kasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum Bangli,

Ida Bagus Suandi, mengatakan untuk perbaikan jalan Abuan-Apuan akan dilaksanakan tahun ini. Proses masih dalam tahap melengkapi dokumen. Perbaikan jalan ini dengan anggaran Rp 1 miliar. **esa**



Jetty Ramdor Tanah Ampo Lanjut Lagi

Alternatif membangun jetty ramdor karena dermaga kapal pesiar dinilai belum layak operasi.

AMLAPURA, NusaBali

Pembangunan jetty ramdor dan break water (pemecah gelombang) di Dermaga Pesiar Banjar Tanah Ampo, Desa Ulakan, Kecamatan Mang-

gis, Karangasem yang terhenti di tahun 2018 akan dilanjutkan lagi. Anggaran yang dipasang untuk kelanjutan proyek ini sebesar Rp 48 miliar. Diharapkan tahun 2019 ini pengerjaannya tuntas sehingga bisa berfungsi optimal untuk menurunkan wisatawan pesiar.

Kepala Dinas Perhubungan Karangasem, Ida Bagus Putu Suastika, mengatakan kelanjutan pembangunan jetty ramdor dan break water masih proses tender. "Kami sangat berharap tempat menurunkan wisatawan pesiar dari sekoci

tuntas tahun ini," harap Ida Bagus Putu Suastika, Minggu (21/4). Pembangunan jetty ramdor dan break water dirancang sejak tahun 2015. Tujuannya agar kapal pesiar yang lego jangkar di Teluk Labuhan Amuk, Desa Antiga, Kecamatan Manggis, bisa menurunkan penumpang dengan menggunakan sekoci, kemudian sekoci nyandar di jetty ramdor itu.

Alternatif membangun jetty ramdor karena dermaga kapal pesiar yang dibangun sejak tahun 2006 dinilai belum layak dioperasikan. Selain

kurang panjang, tidak cocok untuk kapal panjang 300 meter dan kondisi gelombang belum memungkinkan, serta faktor non teknis lainnya. Dermaga yang telah dibangun dengan panjang 154 meter, masih kurang 154 meter lagi. Di samping itu 10 meter di ujung dermaga kondisinya goyang. Pada tahun 2018, mulai dibangun jetty ramdor dan break water di barat dermaga dengan biaya Rp 49,404 miliar.

Pengerjaannya dimulai pada tanggal 18 Agustus 2018, mestinya berakhir 15 Desember 2018. Kemudian

diperpanjang 90 hari, ternyata gagal diselesaikan. Jauh sebelumnya muncul anggaran di APBN 2015 Rp 3 miliar, ternyata kekurangan dana tidak sesuai perencanaan, sehingga gagal tender. Ida Bagus Putu Suastika mengakui, pembangunan jetty ramdor tahun 2018 terhambat karena cuaca di laut tidak menentu. Kesulitan menancapkan tiang pancang yang berjumlah 149. Saat itu, rata-rata tiap tiga hari dalam kondisi normal hanya mampu menancapkan satu tiang pancang, tetapi lebih sering gagal. **k16**

Edisi : Senin, 22, April, 2019

Hal : 8



Dibangun dengan Anggaran Rp 1,9 Miliar Warga Pertanyakan Rencana Penggunaan Gedung PLUT

Negara (Bali Post) -

Gedung Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) yang dibangun di Jalan Ngurah Rai, Kecamatan Jembrana hingga saat ini belum digunakan dan dimaksimalkan. Sejumlah warga Jembrana mempertanyakan pembangunan gedung megah tersebut. Dikhawatirkan pembangunan gedung tersebut akan menambah deretan bangunan mangkrak di Jembrana, sehingga gedung menjadi mubazir.

Gedung tersebut dibangun senilai Rp 1,9 miliar bulan Agus-

tus 2018 lalu dari anggaran di Dinas Perindagkop. Dari pengamatan di lokasi, Kamis (25/4) kemarin, di dalam gedung PLUT tersebut sudah tersedia beberapa meja dan kursi dan ruangan juga tampak bersih. Sedangkan di halaman belum ditata dan masih berantakan.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Perindagkop) Kabupaten Jembrana Komang Agus Adinata dikonfirmasi, Kamis sore kemarin, mengatakan gedung tersebut sudah serah terima tahap pertama

dari rekanan. Namun fasilitas lain, katanya, belum tersedia. Seperti berbagai perlengkapan kantor, penataan parkir dan penataan halaman. Semua, katanya, akan direncanakan dalam anggaran perubahan.

Untuk sementara, kata Agus Adinata, gedung tersebut sudah digunakan untuk rapat-rapat. "Di sana sudah dipakai rapat bersama UMKM dan juga nanti para pedagang pasar untuk revitalisasi," jelasnya. Gedung tersebut, menurut Agus Adinata, akan dimanfaatkan dengan maksimal. (kmb)

Edisi : Jumat, 26, April, 2019

Hal : 10



Minim, Anggaran Pemeliharaan Mobil Damkar

Tabanan (Bali Post) -

Di tengah kondisi kendaraan yang relatif sudah tua, unit pemadam kebakaran (Damkar) ikut disiagakan di gudang penyimpanan logistik Pemilu di lapangan tenis Alit Saputra, Tabanan. Setidaknya ada tiga mobil Damkar yang disiagakan di sejumlah pos penghitungan suara untuk mengantisipasi kebakaran.

Kabid Penanggulangan Kebakaran Satpol PP Tabanan I Ketut Suardi, Kamis (25/4) kemarin mengatakan, dari lima armada yang dimiliki, tiga di antaranya disiagakan di tiga titik tempat penghitungan suara yakni Kecamatan Pupuan, Baturiti dan gedung lapangan tenis Alit Saputra. "Dua armada

sudah kembali ke pos induk karena proses rekapitulasi suara sudah rampung. Tinggal satu armada masih *standby* di gudang logistik," ucapnya.

Terkait kondisi armada Damkar, dia mengakui lima di antaranya sudah berusia tua. Lantaran belum ada pengadaan kendaraan yang baru, kelima armada Damkar hanya diintensifkan dalam hal pemeliharaan. Namun anggaran pemeliharaan tahun ini pun sangat minim yaitu Rp 100 juta. Anggaran ini turun dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp 140 juta.

"Tergantung tingkat kerusakan. Kalau pelumas tiap tiga bulan sudah kita ganti karena ini kendaraan

tua. Kalau jenis kendaraan baru cuma *service* dan ganti oli sudah cukup. Inipun kendaraannya sangat hati-hati sekali saat kita bawa jauh," jelasnya.

Disampaikannya, dari lima armada tersebut, yang bisa dioperasikan hanya tiga unit. Dua unit lainnya hanya berfungsi sebagai menyuplai air, karena mesin portable tidak bisa digunakan dan tidak bisa diperbaiki lantaran tidak ada alat yang cocok. "Jadi mau dibawa ke bengkel manapun tetap tidak bisa diperbaiki," ucapnya.

Disinggung jumlah kasus kebakaran yang terjadi hingga bulan ini, Suardi menyampaikan, 20 hingga 30 kasus. Kebakaran bi-

asanya disebabkan human error seperti kelistrikan yang kurang baik, lupa mematikan dupa dan api dari pembakaran sampah. Upaya preventif sudah kerap dilakukan untuk memberikan edukasi pada masyarakat tentang bahaya kebakaran dan cara penanggulangannya. "Kami rutin gelar simulasi bahaya dan penanggulangan kebakaran ke masyarakat dengan harapan bisa menekan angka kasus," kata Suardi. (kmb28)

DAMKAR - Mobil Damkar disiagakan di gudang logistik Pemilu di Lapangan Alit Saputra.



Bali Banjir Hadiah Infrastruktur

DENPASAR, NusaBali

Kemenangan fantastis pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin (Capres-Cawapres nomor urut 01 yang diusung PDIP-Golkar-PKB-PPP-NasDem-Hanura-PKPI-Perindo-PSI) dengan 92,52 persen suara di Bali dalam Pilpres 2019, menjadi berkah bagi krama Bali. Indi-

Bersambung ke Hal-15 Kolom 1

SAMBUNGAN DARI HALAMAN 1

kasinya, Bali langsung banjir hadiah program infrastruktur dari pemerintah pusat.

Banjir hadiah infrastruktur untuk Bali ini terkuak dari hasil pertemuan Gubernur Wayan Koster dengan Presiden Jokowi di Istana Negara Jakarta, Senin (22/4) lalu. Saat itu, Gubernur Koster menghadap Presiden Jokowi dengan didampingi Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti, Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta, Bupati Gianyar Made Agus Mahayastira, dan Bupati Karangasem I Gusti Ayu Mas Sumatri.

Gubernur Koster mengungkapkan, beberapa program infrastruktur yang akan dikurikan pemerintah pusat untuk Bali, antara lain, pembangunan Pusat Kebudayaan berupa pangung terbuka dan museum tematik yang berlokasi di eks galian C Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Klungkung. Pusat Kebudayaan yang akan dibangun di eks galian C Desa Gunaksa ini nantinya dirancang berkapasitas 25.000 orang.

"Ini untuk tujuan pembinaan seni dan budaya di Bali. Nanti di sana (eks galian C Desa Gunaksa) akan dibangun gedung kesenian dan museum tematik. Sekarang masih dalam proses penyelesaian status lahan. Pak Presiden setuju untuk program pembangunan itu dan telah memanggil menteri terkait. Skemanya masih dipikirkan. Nanti saya akan tindaklanjuti seperti apa skemanya," ujar Gubernur Koster sesuai acara penyerahan SK CPNS di Lapangan Kantor Gubernur Bali, Niti Mandala Denpasar, Kamis (25/4) pagi.

Di samping pembangunan Pusat Kebudayaan yang

PROGRAM INFRASTRUKTUR YANG JUGA DIUSULKAN

- Program pembangunan Pasar Seni di Desa/Kecamatan Sukawati, Gianyar
- Program pembangunan dermaga penyeberangan di Pantai Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan menuju Nusa Penida (Klungkung)
- Pembangunan Dermaga Cruise Tanah Ampo di Desa Padangbai, Kecamatan Manggis, Karangasem

dikurikan pusat dengan dana APBN, Bali juga akan mendapatkan sejumlah program infrastruktur lainnya. Di antaranya, pembangunan Jalan Bypass Lingkar Bali untuk meneruskan Jalan Bypass Prof Dr Ida Bagus Mantra Tohpati (Denpasar)-Kusamba (Klungkung)--yang merupakan proyek hibah dari pemerintah Australia.

Kemudian, pembangunan sejumlah titik Shortcut (Jalan Pintas) Denpasar-Singaraja via Bedugul, pembangunan jalan Trans Jawa-Bali-NTB (melalui jalur Jawa Timur-Buleleng-NTB) yang bertujuan memudahkan menyalurkan barang dan jasa ke kawasan NTB. "Kalau sudah ada jalan Trans Jawa-Bali-NTB, nanti truk-truk besar itu tidak akan melalui Denpasar lagi. Jadi, arahnya ini sudah ke Jalan Lingkar Bali," tegas Gubernur asal Desa Sembiran, Kecamatan Tejakuda, Buleleng yang juga Ketua DPD PDIP Bali ini.

Bukan hanya itu, Gubernur Koster juga mengusulkan beberapa program infrastruktur lainnya yang direspons baik oleh Presiden Jokowi. Misalnya, program pembangunan Pasar Seni di Desa/Sukawati, Gianyar. "Program pembangunan Pasar Seni di Gianyar ini melalui Kementerian PUPR," papar Koster.

Selain itu, dalam pertemuan dengan Presiden Jokowi di Istana Negara, Koster juga usulkan program pembangunan dermaga penyeberangan di Pantai Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan menuju Nusa Penida (Klungkung). Selama ini, masyarakat selalu antri panjang untuk menyeberang dari Pantai Sanur. Wisatawan juga rela berbasah-basahan kalau akan naik boat menuju Nusa Penida. "Selama ini, dermaga yang ada di Sanur itu tidak layak. Ini harus dibangun yang bagus," katanya.

Muncul juga usulan untuk infrastruktur pembangunan Cruise Tanah Ampo, di Desa Padangbai, Kecamatan Manggis, Karangasem. "Pak Presiden juga sudah memerintahkan Menteri Perhubungan ke Bali untuk mengecek itu semua. Jadi, kita diberikan banyak infrastruktur melalui program pemerintah pusat," tegas mantan anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PDIP Dapil Bali tiga kali periode ini.

Sementara itu, jatah proram infrastruktur juga bakal diberikan pusat kepada Kabupaten Tabanan. Menurut Koster, Presiden Jokowi bakal mengurikan dana APBN untuk kelanjutan pembangunan Rumah Sakit Internasional di Desa Nyitdah, Kecamatan Kediri, Tabanan. Program dari Kementerian Kesehatan ini sebagai bentuk penghargaan kepada Bupati Tabanan, Putu Eka Wiryastuti.

"Jadi, Tabanan dapat program pembangunan rumah sakit. Sebab, di Tabanan Pak Jokowi juga menang besar. Program untuk insfrasturur di Bali ini sudah merata, tidak ada kecemburuan antar kabupaten/kota," kilah Koster yang kemarin didampingi Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra

dan Kepala BKD Provinsi Bali, I Ketut Lihadnyana.

Ditanya terkait total anggaran dari pusat yang dibawa ke Bali untuk program infrastruktur pasca Pilpres 2019, menurut Koster, besarnya tidak bisa diestimasi sekarang. Sebab, semua masih dilakukan penghitungan. "Kita jangan sebut angka dulu, kan masih dihitung," sergah suami dari Ni Putu Putri Suastini ini.

Gubernur Koster sendiri sebelumnya memperoleh kejutan manis setelah coblosan Pilpres 2019, Kamis (18/4) lalu. Petang itu sekitar pukul 18.30 Wita, Koster dihubungi Presiden Jokowi yang notabene Capres terpilih hasil Pilpres 2019 melalui telepon. Jokowi telepon Koster untuk menyampaikan apresiasi atas dukungan luar biasa rakyat Bali kepada pasangan Jokowi-Ma'ruf, hingga unggul 92,52 persen suara di Bali.

Koster merupakan Ketua DPD PDIP Provinsi dan sekaligus Gubernur dari PDIP pertama yang ditelepon Jokowi, sebagai bentuk apresiasi atas kemenangan telak Capres-Cawapres 01 dalam Pilpres 2019 di daerahnya. Menurut Koster, kemenangan lebih dari 90 persen suara di Bali tersebut merupakan sebuah surprise bagi Jokowi. Sebab, sebelumnya dukungan Jokowi-Ma'ruf di Bali diprediksi pada kisaran 80 persen suara.

Di akhir percakapan per telepon petang itu, Koster selaku Gubernur Bali menyampaikan rencananya untuk menghadap Presiden Jokowi guna menyampaikan sejumlah aspirasi untuk pembangunan Bali di masa mendatang. Jokowi pun meminta Koster menghadap ke Istana Negara. **nat**

Edisi : Jumat, 26 April 2019.

Hal : 1 dan 15



infrastruktur



TAK LENGKAP: Gedung PLUT yang sudah selesai belum bisa digunakan.

ANOM SUARDANA / RADAR BALI

Telan Miliaran, PLUT Nganggur

NEGARA - Gedung Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) memang sudah selesai dibangun dan sudah diserahkan oleh rekanan yang mengerjakan. Namun hingga kini gedung yang dibangun dengan anggaran Rp 1,9 miliar oleh Pemkab Jembrana tahun lalu di Jalan Ngurah Rai itu masih nganggur.

Gedung megah berlantai dua tersebut sudah dilengkapi beberapa meja dan kursi. Selain itu kebersihan di dalam gedung juga terjaga. Tetapi tidak ada aktivitas maupun pegawai yang ngantor di gedung yang dibangun dengan anggaran dari Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Disperindagkop) Pemkab Jembrana tersebut. "Gedung PLUT itu memang sudah diserahkan tahap pertama oleh rekanan yang mengerjakannya. Namun belum kami manfaatkan dengan maksimal," kata Kadisprindagkop Pemkab Jembrana Komang Agus Adinata, Kamis (25/4). Menurut Adinata belum dimanfaatkan Gedung PLUT itu karena fasilitas yang dibutuhkan masih belum lengkap. Di antaranya sarana dan prasarana perlengkapan kantor yang akan digunakan untuk pegawai bekerja atau keperluan lain. Juga masih perlu dilakukan penataan parkir dan penataan halaman gedung tersebut. (nom/gup)



Apresiasi Kebijakan Bupati Mahayastra

Presiden Jokowi Hadiahi Anggaran

Revitalisasi Pasar Umum Sukawati

BERBAGAI kebijakan pada awal pemerintahan Bupati Gianyar I Made Mahayastra, SST.Par., MAP. mendapat apresiasi langsung dari Presiden Joko Widodo. Presiden ketujuh RI ini pun memberikan hadiah untuk melanjutkan revitalisasi Pasar Umum Sukawati. Rencana tersebut akan direalisasikan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 105 miliar pada 2020. Hal ini terungkap saat pertemuan langsung Bupati Mahayastra dengan Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Senin (22/4).

Bupati Mahayastra dihubungi Selasa (23/4), menerangkan, melalui APBN sebelumnya Pemkab Gianyar sudah memperoleh anggaran Rp 80 miliar untuk revitalisasi Pasar Seni Sukawati. Kini sebagai bentuk apresiasi untuk kerja keras

Bupati Mahayastra, Presiden RI menambah alokasi anggaran untuk melanjutkan revitalisasi pasar blok C atau Pasar Umum Sukawati. "Penyusunan dalam APBN kita dikasi melanjutkan pembangunan yang sebelumnya sudah diberi Rp 80 miliar (untuk Pasar Seni Sukawati) sekarang ditambah lagi Rp 105 miliar," ungkapnya saat dihubungi melalui sambungan telepon.

Kepada Bupati Mahayastra, anggaran Rp 105 miliar yang direalisasikan melalui APBN itu dipastikan langsung oleh Presiden Jokowi. Bahkan orang nomor satu di Republik Indonesia itu memerintahkan langsung Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

(PUPR) RI Basuki Hadimuljono dan Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati untuk memastikan realisasi rencana

tersebut. "Itu 2020 sudah dipastikan sama bapak Jokowi, langsung dipanggil Menteri PUPR dan Menteri Keuangan, dikatakan ini 2020 sudah harus jadi itu perintah Bapak Jokowi," ungkap pria yang juga Ketua DPC PDI-P Gianyar ini.

Hal ini pun memastikan rencana awal Pasar Seni Sukawati yang memiliki *base-ment* nyambung dengan Pasar Umum Sukawati akan segera terealisasi. Bahkan, dipastikan Pasar Umum akan jauh lebih lengkap, mengingat alokasi anggaran dari APBN lebih besar. "Artinya, 2020 setelah pasar seni rampung, akan langsung dikerjakan pasar umum ini," ucapnya.

Perjuangan Bupati Mahayastra ini pun menjadi prestasi luar biasa, sebab total masyarakat Gianyar memperoleh anggaran hampir Rp

200 Miliar dari APBN, untuk revitalisasi Pasar Umum dan Pasar Seni Sukawati. Dipastikan, rencana pembangunan besar ini sedikit pun tidak membebani APBD Kabupaten Gianyar. "Artinya, total itu kita dapat sekitar Rp 200 miliar jadinya dan semua dari APBN. Nah ini juga karunia Sang Hyang Widi Wasa. Kita membangun Rp 200 miliar tanpa menggunakan APBD. Itu prestasi luar biasa," ungkapnya.

Selain apresiasi terhadap kebijakan, Bupati Mahayastra juga mendapat apresiasi atas kemenangan 96% calon Presiden Joko Widodo di Kabupaten Gianyar. Meski demikian besar prestasi Bupati Mahayastra, namun bagi Bupati yang belum setahun menjabat ini, semua itu merupakan prestasi atas kemenangan

masyarakat Gianyar. Kini, Pemkab Gianyar kembali mengharapkan dukungan seluruh masyarakat untuk mendukung penuh rencana ini. Agar rencana ini terealisasi dengan baik, karena ke depan tentu Kabupaten Gianyar akan memiliki ikon baru, yang pastinya akan menarik kunjungan wisatawan mancanegara. Pada akhirnya, manfaat rencana ini akan dirasakan langsung oleh seluruh masyarakat Bali khususnya Gianyar.

Bupati Mahayastra memastikan akan mengawal ketat rencana ini. "Yang sekarang ini (pengerjaan Pasar Umum dan Pasar Seni Sukawati) saya kawal betul, dari nol saya kawal betul, sampai jadi, makanya ini betul-betul akan menjadi mercusuar yang dananya semua dari APBN atas perjuangan Bupati," tandasnya. (ad930)



Anggota Dewan dan Istri Dituntut 1,5 Tahun

Kasus Dugaan Korupsi Proyek Biogas Nusa Penida

DENPASAR, NusaBali

Anggota DPRD Klungkung, Gede Gita Gunawan, 42, dan istri Thiarta Ningsih, 35, serta I Made Catur Adnyana, 56, yang merupakan Kabid Pengembangan Kawasan Pedesaan Klungkung dituntut hukuman

sama, yaitu 1,5 tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi proyek Instalasi Biogas di Nusa Penida, Klungkung.

Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor Denpasar, Rabu (2/4) pukul 14.00 Wita hingga 15.00 Wita, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kadek Wira Atmaja dkk juga menjerat ketiga terdakwa yang disidang terpisah ini dengan pidana denda Rp 50 juta subsidair 2 bulan penjara. Sementara terkait uang pengganti kerugian negara sejumlah Rp 792.912.654, ketiganya lolos hukuman tambahan.

Pasalnya, ketiganya sudah menitipkan uang tersebut ke Kejari Klungkung sebelum ketiganya menjalani penahanan di Kejari Klungkung beberapa waktu lalu. Meskipun demikian, dalam tuntutan JPU tetap mencantumkan hukuman tambahan selama 9 bulan jika ketiganya tidak mampu mengembalikan uang kerugian negara tersebut.

Dalam sidang yang dip-

impin majelis hakim I Wayan Sukanila, JPU Atmaja menguraikan dalam perkara ini terdakwa Gede Gita Gunawan dan istrinya Thiarta Ningsih secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi dalam proyek instalasi biogas di Nusa Penida yang merugikan negara Rp.792.912.654.

Ketiganya dijerat pasal yang sama yaitu Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No.31/1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU No.20/2001 tentang Perubahan Atas UU No.31/1999 tentang Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sesuai dalam dakwaan subsidair JPU.

Usai persidangan, Gede Gita Gunawan yang menggunakan baju batik dan sang istri menolak memberikan komentar terkait jalannya persidangan. Pasutri ini langsung menuju ruang tahanan untuk berkonsultasi dengan kuasa hukumnya.

Menanggapi tuntutan tersebut, Tim Kuasa hukum Gita

Gunawan dan istrinya, Agus Sujoko dkk meminta waktu satu minggu untuk menyampaikan pledoi (pembelaan) atas tuntutan JPU. "Kami mohon diberikan waktu untuk menyampaikan pledoi (pembelaan)," tegas Agus.

Ditambahkannya, dalam

perkara ini JPU seperti menutup mata terkait keterlibatan tersangka lainnya dalam perkara ini. Disebutkan dalam Perpres disebutkan jika pihak yang paling bertanggung jawab dalam kasus seperti ini adalah pihak yang menandatangani kontrak kerja. Dalam proyek

biogas ini yang menandatangani kontrak yaitu I Putu Widiada selaku Kepala BPMDPK-BPD Klungkung. "Jadi sudah jelas yang bertanggung jawab adalah Pengguna Anggaran (PA) yaitu Kepala BPMDPK-BPD," tegasnya.

Akibat kasus ini, kliennya Gede Gita Gunawan yang merupakan incumbent dari Partai Golkar tidak bisa maksimal

bertarung dalam proses Pileg (Pemilihan Legislatif) sehingga tidak lolos kembali sebagai anggota DPRD Klungkung. "Suara yang didapat 2.063 hanya selisih 100 suara dengan diatasnya," tegas Agus.

Seperti diketahui sebelumnya, kasus ini berawal saat Dinas BPMPKBPD Klungkung pada Tahun Anggaran 2014 mendapat dana DAK dari Sumber Daya Energi Terbarukan pada pos anggaran belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat untuk membuat instalasi biogas.

Ketika itu proyek biogas ini di bawah leading sector Badan

Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Keluarga Berencana dan Pemerintah Desa (BPMPKBPD) Klungkung.

Proyek tersebut tersebar di tiga desa di Nusa Penida, yaitu Desa Sakti, Desa Klumpu dan Desa Kutampi Kaler.

Dalam proyek ini, Gede Gita Gunawan dan istrinya sebagai pemilik CV Bhuana Raya yang bukan sebagai pemenang lelang menjalankan proyek tersebut. Akibatnya, dari 40 titik biogas yang direncanakan hanya 38 titik saja terlaksana, sedangkan 2 titik tidak ada.

Padahal per satu unitnya proyek tersebut bernilai Rp 22 juta. Akibat perbuatan terdakwa Catur Adnyana mengakibatkan terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan proyek kegiatan pengadaan belanja barang dan telah memperkaya terdakwa Thiarta Ningsih dan Gede Gita Gunawan selaku korporasi CV Bhuana Raya yang bukan sebagai pemenang lelang. Total kerugian Rp 793 juta. **rez**



Kartu Indonesia Sehat Mulai Dibagikan

Pemprov-Pemkab Berbagi Anggaran Rp 87 Miliar

Di luar yang didistribusikan tahun ini masih ada sisa lima persen yang belum ter-cover, karena anggaran sangat terbatas.

SINGARAJA, NusaBali
Sebanyak 102.043 keping kartu Jaminan Kesehatan

Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN KIS) di Kabupaten Buleleng mulai didistribusikan, Rabu (24/4) kemarin. Meski sempat molor karena pelaksanaan pemilu serentak pertengahan April lalu, pendistribusian JKN KIS seluruhnya sudah sampai di masing-masing desa hingga pekan mendatang.

Pendistribusian ratusan ribu kartu JKN KIS tersebut disebut Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng, Gede Sandhiyasa akan didistribusikan ke masing-masing

desa di Buleleng, selanjutnya kartu JKN KIS sampai ke tangan masyarakat penerimanya, melalui Kasi Kesra di masing-masing Kantor Desa.

Sandhiyasa pun menyebutkan jika pendistribusian sudah diawali oleh Kecamatan Banjar dan Sawan. Sedangkan kecamatan lainnya akan menyusul sesuai penjadwalan hingga pekan depan. Namun dari jumlah tersebut Sandhiyasa mengatakan masih ada sebanyak lima persen atau 40 ribu

penduduk di Buleleng yang belum tercover jaminan kesehatan. Hal itu disebabkan minimnya anggaran yang dimiliki pemerintah untuk menanggung biaya jaminan kesehatan masyarakat.

"Di luar yang didistribusikan tahun ini masih ada sisa lima persen yang belum, karena anggaran sangat terbatas. Tanggungan JKN KIS di Buleleng hingga Rp 87 miliar, sehingga Pemprov Bali dan Pemkab Buleleng melakukan sharing dana," ucap Sandhiyasa.

Sebanyak 51 persen dari Rp 87 miliar ditanggung Pemerintah Provinsi Bali, sisanya 49 persen dibayar Pemkab Buleleng. Pihaknya pun mengaku saat ini sudah menginstruksikan kepada seluruh Perbekel untuk mengupdate data penduduknya, dengan melaporkan yang sudah pindah dan meninggal dunia. Sehingga dari pengurangan data itu akan dialihkan kepada lima persen penduduk di Buleleng yang belum memiliki jaminan kesehatan.

Sementara itu, penerima JKN KIS yang didistribusikan tahun ini tak lagi atas rekomendasi Perbekel. Masyarakat yang menerima adalah mereka yang benar-benar tidak mampu dari segi ekonomi. Penerima yang mendapatkan prioritas itu diambil dari data Disdukcapil Buleleng yang diselaraskan dengan data BPJS Kesehatan. "Kami memang prioritaskan dulu yang benar-benar tidak mampu, seperti yang tidak memiliki penghasilan tetap," jelas dia. **k23**



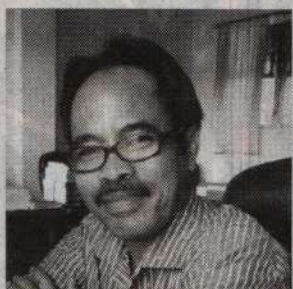
Dewan Harapkan Pembangunan Jembatan Metra-Kedui Diselesaikan

MANGKRAKNYA pembangunan jembatan penghubung dua desa di Kecamatan Tembu-ku mendapat perhatian dari DPRD Bangli. Dewan menilai, alasan terkait medan sulit maupun faktor cuaca bukan alasan yang dibenarkan.

Hal ini diungkapkan anggota DPRD Bangli, I Ketut Suastika, Kamis (24/4). Menurut dia, hal tersebut merupakan konsekuensi dari pihak rekanan sebab telah melakukan tanda tangan kontrak. Terlebih pihak rekanan juga tahu seperti apa kondisi lapangan.

Dijelaskan, sebelum proses pemenang tender, ada prosedur yang dilakukan yakni proses klarifikasi. Dalam proses ini, PPK wajib mengecek kelayakan calon pemenang tender secara objektif. Mulai dari ketersediaan alat berat untuk keperluan pembangunan jembatan, kesiapan penyedia barang, dan sebagainya.

"Klarifikasi inilah yang harus dilakukan secara selektif, harus benar-benar objektif. Karena dampak-dampak seperti inilah (mangkra) yang kami khawatirkan. Jika memang proses-proses ini sudah dilakukan dengan benar, tidak ada kok macet. Terkecuali benca-



TRIBUN BALI/M FREDEY MERCURY

I MADE SUDIASA

na alam," ujarnya.

Anggota dewan lainnya, I Made Sudiasa menilai, kontraktor pelaksana kegiatan tidak profesional dalam menyelesaikan pekerjaannya. Penilaian tersebut dilandasi informasi yang mereka terima, bahwa pengerjaan di lokasi pembangunan tidak optimal. Di lain sisi, Sudiasa juga menilai Dinas PUPRKim semestinya lebih selektif dalam menentukan pemenang tender.

"Ini bukan menjadi suatu pembelajaran lagi di Dinas PUPRKim, karena sudah berkali-kali terjadi kasus serupa. Semestinya dinas PUPRKim saat menentukan pemenang tender, melihat dari kualitas kontraktor yang lebih mum-

puni. Sebab, areal lokasi pembangunan jembatan sangat sulit," ujarnya.

Sudiasa juga memberi masukan terhadap pentingnya penilaian khusus, dari Dinas PUPRKim terhadap kontraktor pelaksana. Jelas dia, hal ini menyangkut sanksi atas program kerja yang dibuat dan telah dikerjakan. "Kontraktor itu punya program kerja. Bulan ini harus menyelesaikan apa, bulan depan apa. Kalau ini tidak ditepati, mestinya harus ada sanksi yang dilakukan oleh Dinas PUPRKim," tegasnya.

Mengenai mangkraknya proyek pembangunan jembatan senilai Rp 4,6 miliar tersebut, Politisi Partai Demokrat asal Desa Undisan menginginkan sikap tegas dari pemerintah daerah untuk kedepannya. Terlebih masyarakat sekitar memiliki ekspektasi tinggi atas pembangunan jembatan itu.

"Harapan masyarakat sekitar akan jembatan penghubung itu sangat tinggi, serta pembangunan jembatan sangat diidam-idamkan, baik masyarakat di Dusun Kedui maupun Dusun Metra. (adv/mer)